

Peran Negara dalam Mengurus Kebudayaan¹

Cecep Rukendi

(Staf Litbang Departemen Kebudayaan dan Pariwisata)

Abstrak

Sebagai negara bangsa yang telah lebih dari setengah abad berdiri dan terdiri dari ratusan suku bangsa, Indonesia masih mengalami masalah dalam menjaga integritas bangsanya. Hal mendasar yang belum terselesaikan adalah masalah pembentukan kebudayaan nasional yang menjadi dasar integrasi suatu bangsa.

Secara internal, bangsa Indonesia masih lemah dalam manajemen ratusan perbedaan budaya bangsa sehingga seringkali terjadi konflik sosial antarsuku bangsa, antarpemeluk agama, antarras, dan antargolongan yang mengancam kesatuan bangsanya. Secara eksternal, dalam menghadapi globalisasi, ketahanan budaya bangsa Indonesia juga masih sangat rendah karena tidak adanya identitas nasional yang menjadi kebanggaan dan filter dalam menghadapi serbuan budaya asing yang tidak semuanya baik. Tidak berlebihan bila pada tahun 1970-an, Koentjaraningrat mensinyalir bahwa bangsa Indonesia mengidap kemiskinan budaya (cultural deficiency).

Oleh sebab itu, pembangunan kebudayaan merupakan suatu proses yang penting dilakukan untuk pemajuan peradaban bangsa Indonesia. Namun timbul polemik di antara aktivis dan cendekiawan ketika kebudayaan hendak diurus oleh negara atau pemerintah. Mereka yang tidak setuju dengan peran negara dalam mengurus kebudayaan, trauma pada kebijakan politik budaya pada era rezim Orde Baru ketika kultur (budaya) dimanipulasi oleh struktur (negara) untuk kepentingan status quo penguasa. Di pihak lain, bila negara tidak ikut mengurus kebudayaan, maka pembentukan kebudayaan baru yang bernama kebudayaan nasional Indonesia yang menjadi identitas seluruh sukubangsa (etnis) penyusunnya terasa sulit untuk diwujudkan.

Makalah ini akan mengkaji bagaimana peran negara dalam mengelola perbedaan kebudayaan sebagai unsur pembentuk bangsa Indonesia. Juga akan dikaji bagaimana peran negara dalam pembangunan kebudayaan nasional sehingga terbentuk masyarakat adab Indonesia yang bangga pada kebudayaannya sendiri, apresiatif terhadap kebudayaan lain yang berbeda, dan adaptif serta memiliki daya saing terhadap serbuan budaya asing melalui globalisasi.

1. Pendahuluan

Secara klasik terdapat dua pendekatan utama dalam ilmu sosial dan budaya dalam melihat relasi atau hubungan antara negara dengan masyarakat, yaitu pendekatan yang terpusat pada negara (*state-centered*) dan pendekatan yang terpusat pada masyarakat (*society-centered*). Keduanya melihat masing-masing entitas secara dikotomis yang saling bertentangan. Pendekatan *state-centered* melihat negara sebagai pusat segalanya yang sangat dominan

¹ Draf artikel ini dibuat untuk dipresentasikan pada Simposium Internasional ke-4 Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA "Indonesia in the Changing Global Context: Building Cooperation and Partnership?" Pada Panel: Cosmopatriots: Globalization, Patriotism, Cosmopolitanism in Indonesia. Kampus UI Depok, 12-15 Juli 2005.



dalam mengatur segala urusan masyarakatnya, sedangkan pendekatan *society-centered* lebih memusatkan perhatian pada peran masyarakat yang sangat dominan dalam mengatur segala urusannya dan melihat negara sebagai sebuah institusi jahat yang memanipulasi segala pengaturan dan kebijakan demi eksistensinya sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakatnya².

Dalam konteks masyarakat atau sistem sosial budaya yang demokratis dan semakin intensifnya globalisasi, kedua pendekatan itu terasa telah usang dan tidak relevan lagi dalam mengkaji relasi antara negara dan masyarakat. Dikotomi relasi antara negara dan masyarakat hanya cocok dalam menganalisis suatu sistem sosial yang otoriter dan hegemonik dimana tujuan negara dengan masyarakatnya berbeda karena pemerintah yang menjalankan tugas negara tidak mencerminkan aspirasi masyarakatnya.

Pendekatan yang lebih relevan dalam mengkaji sistem sosial demokratis di era globalisasi adalah pendekatan jalan ketiga (*The third way*) Anthony Giddens yang melihat relasi antara negara dengan masyarakat dalam hubungan yang setara dimana ada pergeseran peran negara dari negara sebagai *government* (pengatur) menjadi *good governance* (pengelola atau pengurus yang baik).

Pemahaman mengenai pengelolaan pemerintahan negara yang baik (*good governance*) tersebut harus mengacu pada pemahaman bahwa bukan hanya apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah saja sebagai representasi negara yang harus baik, akan tetapi juga keseluruhan *stakeholders* yang terkait dengan penyelenggaraan masalah dan kepentingan publik juga harus memiliki kapasitas yang memadai.

Mahathir dan Ishihara (1995) sebagaimana dikutip oleh Tim Peneliti Litbang Budpar (2004:II-2) mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), ternyata sangat memerlukan terciptanya kondisi ideal dari tiga *stakeholders*, yaitu:

1. Pihak pemerintah harus mempunyai kemampuan untuk mewadahi proses politik atau pengambilan keputusan mengenai norma dan kebijakan yang selanjutnya bisa diimplementasikan dalam bentuk regulasi dalam birokrasi pemerintahan.
2. Pihak Badan Usaha Swasta (pemilik modal) harus memiliki kemampuan untuk selalu meningkatkan persediaan modal, membuka kegiatan baru dan menawarkan kesempatan berusaha baru untuk masyarakat luas.

² Pendekatan *state-centered* dan *society-centered* ini dapat dilihat dalam artikel Langenberg (1990) yang membahas bahasa, ideologi, dan hegemoni negara orde baru.



3. Pihak masyarakat madani (*civil society*) harus mempunyai kemampuan mandiri untuk membangun norma positif, merumuskan permasalahan, mengartikulasikan permasalahan dan kepentingan masyarakat luas serta mampu melakukan pengawasan terhadap kedua mitranya.

Kolaborasi yang baik antara ketiga *stakeholder* tadi (pemerintah/negara, pemilik modal, dan masyarakat sipil) juga berlaku dalam pengelolaan dan pembangunan kebudayaan pada bangsa baru seperti Indonesia. Bahkan di Indonesia, keikutsertaan negara bahkan tanggung jawab negara dalam membangun kebudayaan nasional yang besar adalah amanat dan tuntutan rakyat sendiri bahkan telah menjadi kesepakatan di antara para tokoh pendiri bangsa Indonesia.

Namun, hingga setengah abad lebih Indonesia merdeka, di antara penggiat kebudayaan, belum ada persepsi yang sama mengenai siapa yang berhak mengurus kebudayaan. Mh Nurul Huda, peneliti pada *Desantara Institute for Cultural Studies* misalnya, tidak sepakat dengan dibentuknya sebuah institusi atau Departemen Pemerintah yang mengurus kebudayaan (*Kompas*, 27/11/2004).

Huda berpendapat bahwa negara atau pemerintah tidak berwenang menafsirkan kebudayaan rakyatnya. Bila negara mengurus kebudayaan rakyatnya, maka yang akan terjadi adalah menyempitnya ruang kreatif masyarakat, terjadinya penaklukan daya kultural masyarakat oleh penguasa, dan misrepresentasi nilai budaya akibat hasil produksi budaya oleh negara. Ini sebenarnya senada dengan apa yang pernah didengungkan oleh Ignas Kleden dekade 1980-an yang menyatakan bahwa struktur (politik) telah mengalahkan kultur (masyarakat) pada saat pemerintah Orde Baru (Orba) berkuasa.

Pendapat tersebut tidak didasarkan pada realitas sosial budaya bangsa kita yang lengkap. Kendati memang ada trauma pada politik budaya Orba dulu ketika kultur (budaya) dimanipulasi untuk kepentingan status quo penguasa. Pendapat tersebut justru mirip apologi para teknokrat Orba yang mengabaikan pembangunan kebudayaan, karena menganggap pembangunan kebudayaan akan terjadi dengan sendirinya berkat pembangunan ekonomi sehingga tidak perlu perencanaan khusus untuk mengurus dan membangun kebudayaan bangsa.

Polemik dan diskursus mengenai siapa yang berhak dalam pembangunan budaya tersebut terjadi sebenarnya karena tidak adanya kesamaan persepsi dalam memahami makna kebudayaan di antara para akademisi, praktisi budaya, birokrat, dan masyarakat sendiri.



2. Mendefinisikan Kembali Kebudayaan

Sejak berdirinya filsafat dan ilmu yang mengkaji kebudayaan tampaknya memang tidak pernah ada definisi atau konsep kebudayaan yang dipahami secara sama. Banyak sekali teori dalam antropologi, sosiologi, arkeologi, dan kajian budaya, serta ilmu sosial lainnya yang mendefinisikan kebudayaan. Konsep kebudayaan yang sangat populer dan diakui di secara luas di Indonesia, baik di dunia akademik maupun praktisi adalah definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat. Dengan mengutip buku klasik J.J. Honigman (1959), Koentjaraningrat (1981) mendefinisikan kebudayaan (*culture*) sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Konsep kebudayaan Koentjaraningrat tersebut sebenarnya mengandung kelemahan dalam analisis akademis karena kebudayaan didefinisikan secara sangat generalis dan dianggap mencakup segala sesuatu selain alam. Sebagaimana dikatakan oleh Huntington (2000:xv)" ... *if culture includes everything, it explains nothing. Hence we define culture in purely subjective terms as the values, attitude, beliefs, orientations, and underlying assumptions prevalent among people in a society*".

Saya sepakat dengan Marzali (2002:95) yang memahami kebudayaan (kultur)³ dalam kajian-kajian *cultural development* sebagai 'sistem ideasional', atau 'sistem gagasan', atau *the state of mind* yang mendorong pola perilaku yang khas pada suatu kelompok sosial tertentu. Kebudayaan, berperan sebagai *independent variable* bila dikaitkan dengan kemajuan perekonomian suatu masyarakat. Namun di saat lain, untuk mencapai kemajuan perekonomian tersebut kebudayaan pun bisa direayasa melalui kebijakan publik (*public policy*); jadi kebudayaan berubah menjadi *dependent variable*. Tempat yang pas bagi kebudayaan adalah seperti yang diungkapkan oleh Daniel Patrick Moynihan bahwa '*The central conservative truth is that it is culture, not politics, that determines the success of a society. The central liberal truth is that politics can change a culture and save it from itself*' (Harrison dan Huntington 2000:xiv).

³ Marzali (2002) berpendapat menerjemahkan konsep culture menjadi kultur. Namun dalam tulisan ini saya merasa lebih pas jika mendefinisikan konsep culture sebagai kebudayaan dalam bahasa Indonesia.



3. Hubungan Negara dan Kebudayaan

Sejak Indonesia hendak didirikan, para tokoh pendiri bangsa Indonesia telah menyadari betapa pentingnya membentuk kebudayaan nasional sebagai perekat persatuan nasional.

Namun sebagaimana diungkapkan oleh Raden (t.t.) usaha untuk membentuk sosok kebudayaan nasional dari suatu kondisi masyarakat yang terdiri dari pelbagai etnis dan budaya tentu saja tidak mudah. Hal inilah yang menyebabkan pada tahun 30an terjadi perdebatan seru diantara para cendekiawan-budayawan tentang apa yang harus menjadi landasan dari kebudayaan nasional ini. Gejala tsb terekam dalam peristiwa yang disebut Polemik Kebudayaan.

Dalam "Polemik Kebudayaan" Sutan Takdir Alisyahbana (STA) secara tegas menyatakan bahwa ciri yang utama dari bangsa baru yang bernama Indonesia ini terletak pada semangat rakyatnya untuk bersatu dan menciptakan suatu kebudayaan baru. Oleh karena itu, kebudayaan baru atau kebudayaan nasional ini sama sekali bukan hasil kolase dari kebudayaan daerah. Ki Hadjar Dewantara (KHD) pun, dalam konsepnya yang merumuskan bahwa kebudayaan nasional terdiri dari puncak-puncak kebudayaan daerah, menekankan pentingnya penciptaan kebudayaan baru. Perbedaan antara KHD dan STA dalam hal ini adalah, KHD menghendaki kebudayaan baru ini diciptakan dengan memanfaatkan unsur-unsur kebudayaan daerah yang dianggap adiluhung, sedangkan STA menghendaki agar kebudayaan Baratlah yang dijadikan landasan dari kebudayaan nasional⁴.

Selanjutnya, dalam menjelaskan hubungan antara kebudayaan dengan negara, sebagaimana dikutip oleh Supardi (2003) Bung Hatta menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara negara dengan kebudayaan yang disampaikan pada Kongres Kebudayaan tahun 1948. Bung Hatta menyatakan bahwa: *'pemerintahan suatu Negara dapat hidup subur apabila kebudayaan tinggi tingkatnya, karena kebudayaan berpengaruh pada sifat pemerintahan Negara.'*⁵

Juga tidak kalah perdebatan antara Ki Mangoensarkoro dengan Ir. Koentjoro Poerbopranoto tentang hubungan antara kebudayaan dan Negara. Menurut Ki Mangoensarkoro, kebudayaan itu setelah Negara ada. Untuk membantah pandangan ini Koentjoro mengutip pendapat PJ.

⁴ Untuk mengetahui lebih dalam mengenai polemik kebudayaan di antara para cendekiawan Indonesia di awal pendirian Negara Bangsa Indonesia dapat dilihat dalam buku klasik "Polemik Kebudayaan" yang disunting oleh Achdiat K. Mihardja (1977).

⁵ Evaluasi dan Strategi Kebudayaan, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 1987.



Bouman yang menyatakan: '*Negara merupakan penjelmaan suatu hasil atau 'emanatie' (pancaran) kebudayaan.*' Selanjutnya Koentjoro menyatakan bahwa: '*kebudayaan adalah tali pengikat atau semen yang menyatupadukan masyarakat suatu Negara, kebudayaanlah yang mengikat golongan-golongan dalam masyarakat menjadi suatu organisasi hukum.*'⁶

Oleh sebab itu, para pendiri negara akhirnya menyepakati peran negara dalam mengurus kebudayaan dengan memasukan dalam konstitusi negara (UUD 1945) pasal 32 "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Saat ini pasal dalam konstitusi tersebut telah diamandemen sejak bergulirnya reformasi agar npemerintah tidak menghegemoni kebebasan rakyatnya, dan berbunyi menjadi:

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

4. Pentingnya Negara Mengurus Kebudayaan Indonesia

Memang tidak akan pernah ada definisi yang seragam tentang kebudayaan. Namun bila semua definisi tentang kebudayaan tersebut dikumpulkan tampak akan ada benang merah bahwa kebudayaan memiliki dua aspek, yaitu aspek statis dan progresif atau dinamis. Aspek statis merujuk pada benda-benda hasil budaya peninggalan masa lalu dan sekarang. Sedangkan aspek dinamis dari kebudayaan merujuk pada nilai-nilai, pandangan hidup, norma-norma, kepercayaan, dan hal-hal lainnya yang bersifat abstrak yang selalu mengalami proses reproduksi (dekonstruksi dan rekonstruksi) oleh masyarakat pemilik kebudayaan itu sendiri (Rukendi, 2004).

Dengan melihat kedua aspek kebudayaan tersebut, justru menunjukkan betapa perlunya negara dalam hal ini pemerintah mengurus kebudayaan bangsa secara terencana dalam suatu Departemen yang melaksanakan pembangunan kebudayaan.

Yang paling utama dari aspek statis kebudayaan bangsa kita adalah mengenai masih lemahnya pemeliharaan dan pengelolaan benda-benda hasil budaya serta masih rendahnya apresiasi budaya dan kesadaran sejarah bangsa kita. Ribuan benda dan situs bernilai budaya dan sejarah masih banyak yang terbengkalai dan terancam rusak karena minimnya kualitas

⁶ Evaluasi dan Strategi Kebudayaan, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 1987.



sumber daya manusia (SDM) dan anggaran negara untuk memelihara dan mengelolanya. Pertanyaannya adalah apakah hal itu bisa ditangani secara langsung oleh masyarakat? Apakah konservasi Candi Borobudur, museum-museum, dan sebagainya bisa berjalan dengan sendirinya tanpa diurus oleh pemerintah?

Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang masih rendah dan kondisi ekonomi negara yang masih sulit, menjadikan sebagian besar masyarakat Indonesia pada situasi yang sulit. Di lain pihak, masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap benda-benda budaya yang bernilai sejarah dan purbakala telah mendorong tindakan-tindakan yang merusak kelestarian benda-benda budaya tersebut, seperti terjadinya perdagangan ilegal, pemalsuan, penyelundupan dan pencurian benda-benda cagar budaya.

Dalam aspek dinamis kebudayaan, kita melihat ada beberapa kendala dari sistem sosial budaya Indonesia, yaitu:

Pertama, adanya gejala disintegrasi sosial yang mengancam keutuhan nasional bangsa Indonesia. Setelah lebih setengah abad merdeka, wilayah Indonesia masih dikepung oleh sebagian kelompoknya yang ingin melepaskan diri dari keutuhan integrasi dengan Indonesia. Di ujung barat Sumatera (wilayah paling barat Indonesia) masih ada Gerakan Aceh Merdeka (GAM), di tengah masih ada Republik Maluku Selatan (RMS), dan di ujung paling timur (Papua) masih ada Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin ke luar dari Indonesia. Hal ini menunjukkan masih lemahnya bangsa Indonesia dalam mengelola ratusan perbedaan budaya bangsa sehingga sering terjadi konflik antarsuku bangsa, antarpemeluk agama, antarras, dan antargolongan yang mengancam integrasi atau kesatuan bangsa tersebut. Hal itu terjadi karena adanya permasalahan mendasar yaitu belum terbentuknya kebudayaan nasional yang menjadi tempat berpijak dan tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh unsur pendukung masyarakat Indonesia sebagai prasyarat kesatuan dan persatuan suatu bangsa.

Melalui paradigma multikulturalisme, negara dan masyarakat memang harus mengakui keragaman budaya dalam posisi yang setara. Namun dalam konteks menjaga keutuhan sebuah bangsa harus ada kebudayaan nasional yang menjadi pegangan dari semua unsur pembentuknya. Schlesinger (1992) menyatakan bahwa banyak negara di dunia pecah karena mereka gagal memberikan alasan-alasan yang kuat kepada orang-orang dari berbagai latar belakang etnis untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari negara yang sama. Hal inilah



yang tampaknya sedang dialami oleh negara dan bangsa kita saat ini. Hampir tidak ada alasan lain selain alasan sejarah yang didengung-dengungkan mengapa kita bersatu dalam negara bangsa Indonesia (Rukendi, 2003).

Kedua, Bangsa Indonesia juga masih mengalami disorientasi nilai pascaruntuhnya Orde Baru sehingga rasa takut, rasa malu, dan rasa bersalah seolah lenyap dari kehidupan keseharian kita. Pertanyaannya sekali lagi adalah apakah krisis budaya tersebut akan lenyap dengan sendirinya bila diserahkan pada masyarakat sepenuhnya tanpa ada bantuan dari negara?

Ketiga, dalam menghadapi globalisasi, ketahanan budaya bangsa Indonesia juga masih sangat rendah karena tidak adanya jati diri yang menjadi kebanggaan dan filter bangsa kita dalam menghadapi serbuan budaya asing yang tidak semuanya baik.

Globalisasi sebagaimana diungkapkan Oetama (2004) membawa kemajuan dan kemakmuran, namun menurut kenyataannya, terlepas dari faktor-faktor latar belakang dan penyebabnya, globalisasi juga mengakibatkan kesenjangan kehidupan warga dunia yang bertambah. Ada gejala baru kemiskinan, marginalisasi dan ketinggalan semakin jauh.

Globalisasi yang didominasi oleh ideologi kapitalisme saat ini telah menjadi arena persaingan dan pertarungan kepentingan yang bebas antarbangsa dan negara. Di sini, kita melihat bahwa budaya Indonesia tampak kalah (*defeated culture*) bersaing dengan kebudayaan-kebudayaan negara dan bangsa lainnya, terutama Barat (Amerika dan Eropa). Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya dan membiayai pembangunannya, Indonesia sangat tergantung kepada negara bangsa lainnya.

Masyarakat Indonesia banyak yang lebih suka dengan film, musik, makanan, cara berpakaian seperti orang Barat dan meninggalkan kebudayaannya sendiri. Sedangkan orang Barat jarang yang gandrung dengan kebudayaan Indonesia. Hampir tidak pernah terbayangkan misalnya, suatu saat orang Barat suka meminum wedang jahe, makan gethuk, berjoget dangdut, dan suka menonton film-film Indonesia seperti Bajay Bajuri atau main jelangkung.



Kekalahan budaya tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memang mengidap kemiskinan budaya (*cultural deficiency*)⁷ seperti pernah diungkapkan oleh Koentjaraningrat (1975) dan budayawan Mochtar Loebis (1977). Koentjaraningrat menyebutkan bahwa mentalitas masyarakat Indonesia yang menyebabkan keterbelakangan adalah mentalitas yang merendahkan kualitas, berhasrat mencapai tujuan secepatnya, tidak bertanggung jawab, dan tidak percaya diri sendiri. Sedangkan Loebis mengungkapkan enam sifat manusia Indonesia, yaitu: munafik atau hipokrit, enggan bertanggung jawab, bersikap dan berperilaku feodal, percaya takhayul, artistik, dan lemah watak atau karakter.

5. Cara Membangun Kebudayaan

Kebudayaan bukan takdir Tuhan ataupun gejala alam sehingga masyarakat pemiliknya dapat merubah dan membangunnya menjadi lebih baik. Upaya membangun kebudayaan Indonesia yang dirancang secara sadar—*a creation by design and not by default*—untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi tersebut merupakan suatu hal yang tidak boleh terabaikan. Jalan keluar dari tatanan global tidak cukup hanya dengan upaya mengubah struktur tatanan dunia. Hal itu harus dibarengi oleh satu usaha bersama untuk memperbaiki kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri dan oleh karenanya kebudayaan menjadi satu hal yang sangat sentral sifatnya (Oetama, 2004).

Dalam antropologi dan arkeologi, kita selalu diharapkan untuk bercermin dari pengalaman masyarakat (negeri) lain dan masyarakat yang telah lalu. Banyak masyarakat di masa lampau punah karena persoalan-persoalan mendasar yang sebenarnya juga dihadapi oleh masyarakat kini. Tulisan Robert Tainter, *The Collapse of Complex Societies* (1991) sebagaimana dikutip Saifuddin (2005), misalnya, menggambarkan bagaimana sejumlah masyarakat di dunia, melalui data arkeologis, mengalami kepunahan karena kelemahan-kelemahan kebudayaan mereka. Demikianlah kehancuran Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Hindia Belanda, di wilayah nusantara karena gagal mengelola kebudayaan masyarakatnya.

Dibentuknya kembali Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan visi "terwujudnya jati diri bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka multikultural, kesejahteraan rakyat, dan persahabatan antarbangsa" sebagaimana tercantum dalam rencana strategis (2005-

⁷ Di sini penulis ingin menekankan bahwa bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan suku bangsa yang banyak (*pluralism*), tetapi sebenarnya miskin secara budaya (*cultural deficiency*).



2009) merupakan suatu langkah yang tepat untuk membangun kebudayaan bangsa yang masih carut-marut tersebut.

Namun, demi tercapainya pembangunan kebudayaan bangsa secara efektif, ada tiga hal yang harus menjadi syarat pelaksanaannya. Pertama, dari segi paradigma, pembangunan kebudayaan harus dilihat sebagai pembangunan harkat dan martabat manusia Indonesia seutuhnya untuk pemajuan peradaban bangsa. Kebudayaan jangan dilihat sebagai komoditi untuk dikonservasi atau komoditi untuk dijual (dieksploitasi) demi kepentingan industri pariwisata semata sebagaimana diresahkan oleh penggiat budaya selama ini.

Kedua, dari segi operasional, meskipun telah berubah status dari Kementerian menjadi Departemen yang mengurus kebudayaan dan pariwisata, Depbudpar harus tetap memosisikan diri sebagai pembina dan fasilitator yang mendorong dan memberdayakan masyarakat dan pihak swasta sebagai pelaku utama dalam pembangunan kebudayaan. Di era globalisasi dan otonomi daerah, pemerintah sudah tidak lagi memegang semua peranan dalam pembangunan kebudayaan nasional. Fungsi lembaga pemerintah yang bertugas membangun kebudayaan bangsa sebaiknya lebih memfokuskan diri pada fungsi sebagai koordinator kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan nasional. Sedangkan fungsi formulasi dan implementasi berbagai strategi pembangunan kebudayaan hendaknya dilakukan oleh masyarakat melalui LSM/NGO, dunia swasta, tokoh masyarakat, dan sebagainya.

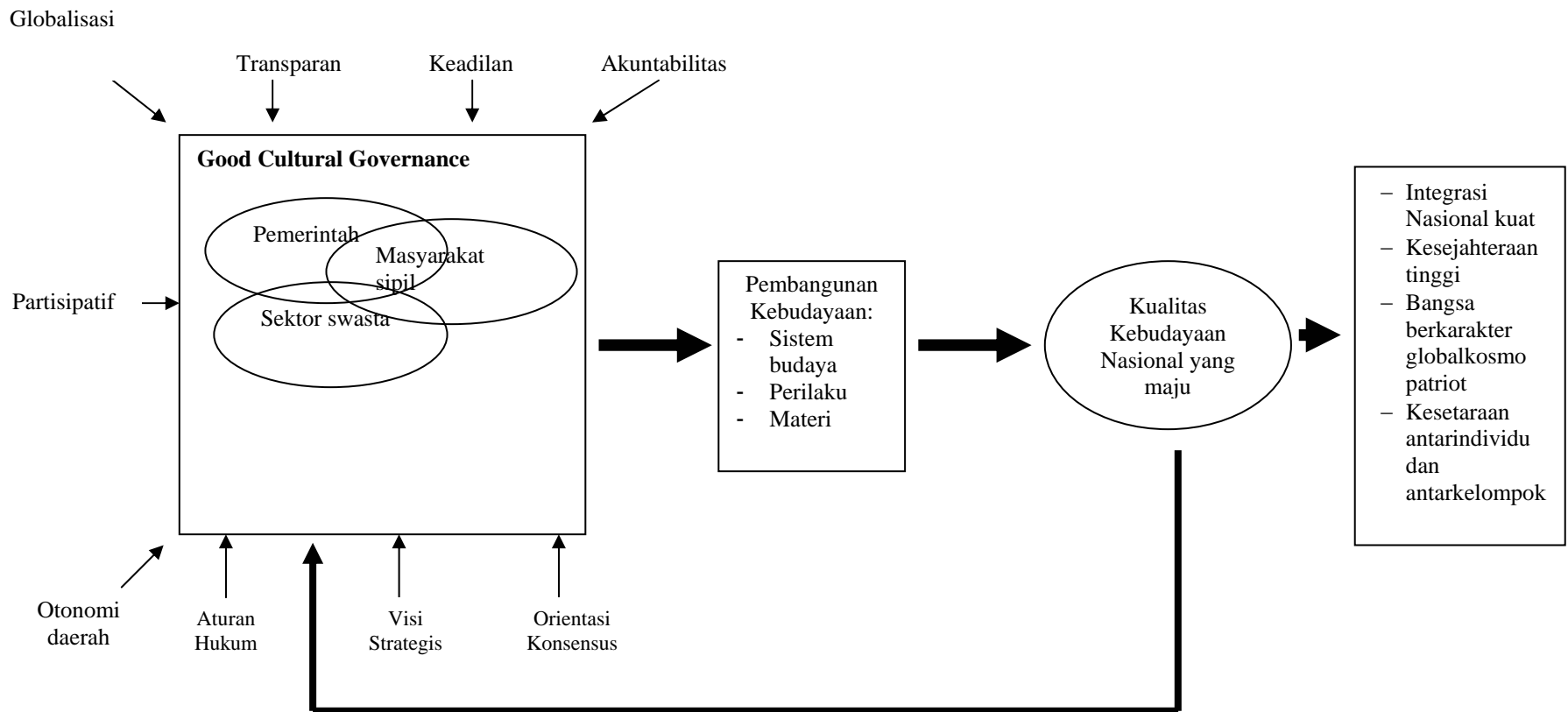
Ketiga, dari segi sumber daya manusia (SDM), karena begitu kompleksnya urusan kebudayaan, pemerintah juga harus melibatkan banyak pihak yang peduli (*stakeholders*) terhadap pembangunan kebudayaan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program kegiatannya. Antropolog dan sosiolog yang mendalami aspek dinamis dan segi abstrak kebudayaan, arkeolog yang lebih memahami aspek statis dan wujud fisik kebudayaan, seniman dan dunia swasta yang terjun dalam dunia praktis dan kebudayaan populer, serta birokrat yang berpengalaman dalam manajemen program akan memberikan gambaran yang lebih holistik dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan kebudayaan.

Dengan ketiga syarat dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan tersebut, kekhawatiran bahwa pemerintah akan memanipulasi kebudayaan demi kepentingan *status quo* kekuasaannya akan bisa dihindari.[].





Diagram 1
Good Cultural Governance Model



Kepustakaan

- Giddens, A.
1998 (1999) *The Third Way*. Terjemahan PT. Gramedia: Jakarta.
- Harrison, L.E. dan S.P. Huntington
2000 *Culture Matters. How Values Shape Human Progress*. Basic Books.
- Huda, M.N
2004 Negara Perlu Mengurus Kebudayaan? dalam *Kompas*. Jakarta: 27 Nopember.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
2004 *Draf Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional Tahun 2005-2009*. Jakarta: Kembudpar.
- Koentjaraningrat
1975 *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
1981 *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Langenberg, M van
1990 "The New Order State: Language, Ideology, Hegemony", in Arief Budiman (ed.) *State and Civil Society in Indonesia*. Center of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Loebis, M.
1977 *Manusia Indonesia* (Sebuah pertanggung jawaban). Jakarta: Inti Idayu Press.
- Marzali, A.
2002 "Ilmu Antropologi Terapan bagi Indonesia yang sedang Membangun". Pidato Pengukuhan Guru Besar Antropologi, FISIP UI. Depok.
- Mihardja, A.K. (Peny.)
1997 *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Oetama, J.
2004 Demokrasi dan Kebudayaan Indonesia, dalam *Kompas*. Jakarta: 17 September.
- Raden, F.
t.t. Mencari Dasar Ideologi Kebudayaan Nasional. Diakses terakhir pada 12 Desember 2004 di http://www.sit.wisc.edu/~permias/events/seminar/paper_raden.html
- Rukendi, C.
2003 Menyelamatkan Indonesia dengan Kontrak Sosial Baru, dalam *Sinar Harapan*. Jakarta: 28 Juli.
2004 Pentingnya Negara Mengurus Kebudayaan, dalam *Sinar Harapan*. Jakarta: 11 Desember.
- Saifuddin, A.F.
2005 Perbudakan dari Zaman ke Zaman, dalam *Kompas*. Jakarta: 2 Juli.
- Schlesinger Jr, A.M.
1992 *Disuniting of America: Reflections on A Multicultural Society*. W.W. Norton, 500 Fifth Avenue, Ney York, NY, USA 10110.
- Supardi, N.
2003 Departemen Kebudayaan (Sebuah Impian Lama). Diakses terakhir pada 12 Juni 2005 di http://kongres.budpar.go.id/news/article/Sebuah_Impian_lama.htm



Draft Only

Tim Peneliti Litbang Budpar

2003 Laporan Pendahuluan Studi Pola Dasar Pengembangan SDM. Jakarta: Asdep
Urusan Litbang Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

